



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT KERJA DENGAN MENTERI KESEHATAN RI**

**KOMISI IX DPR RI  
(BIDANG DEPARTEMEN KESEHATAN,  
DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,  
BADAN PENGAWAS OBAT & MAKANAN, BKKBN, DAN BNP2TKI)**

---

Tahun Sidang	:	2007-2008
Masa Persidangan	:	III
Jenis	:	Rapat Kerja
Dengan	:	Menteri Kesehatan RI
Sifat	:	Terbuka
Hari, tanggal	:	Senin, 17 Maret 2008
Waktu	:	Pukul 10.00 – selesai
Acara	:	1. Membicarakan realisasi Program Depkes RI Tahun 2007 2. Membicarakan masalah aktual yang berhubungan dengan bidang tugas Depkes RI; 3. Lain-lain
Ketua Rapat	:	Dr. Ribka Tjiptaning / Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris	:	Dra. Tri Udiartiningrum/ Kabagset. Komisi IX DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI, Gedung Nusantara I Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Anggota yang hadir	:	40 Anggota dari 50 Anggota Komisi IX DPR RI 5 orang ljin, 1 orang sakit

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI beserta jajarannya dibuka pukul 10.40 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 99 ayat (1) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat didahului dengan Pengantar Ketua Komisi IX DPR RI dilanjutkan dengan paparan dari Menteri Kesehatan RI.

**KESIMPULAN**

Setelah mendengar usulan/tanggapan dari Anggota Komisi IX DPR RI dan jawaban Menteri Kesehatan RI, maka kesimpulan Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan RI yaitu :

1. Komisi IX DPR RI mendesak Departemen Kesehatan RI untuk menjadikan Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagai payung hukum dalam pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat bagi masyarakat miskin 2008. Untuk itu perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat miskin tahun 2008 melalui pembicaraan bersama antara Komisi IX DPR RI dengan Departemen Kesehatan RI.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Departemen Kesehatan RI untuk bertanggung jawab penuh dalam pencegahan penyakit menular dan gizi buruk dengan memberdayakan masyarakat serta melibatkan berbagai sektor lain termasuk pemerintah daerah.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT KERJA DENGAN MENTERI KESEHATAN RI**

**KOMISI IX DPR RI  
(BIDANG DEPARTEMEN KESEHATAN,  
DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,  
BADAN PENGAWAS OBAT & MAKANAN, BKKBN, DAN BNP2TKI)**

---

Tahun Sidang	:	2007-2008
Masa Persidangan	:	III
Jenis	:	Rapat Kerja
Dengan	:	Menteri Kesehatan RI
Sifat	:	Terbuka
Hari, tanggal	:	Senin, 17 Maret 2008
Waktu	:	Pukul 10.00 – selesai
Acara	:	1. Membicarakan realisasi Program Depkes RI Tahun 2007 2. Membicarakan masalah aktual yang berhubungan dengan bidang tugas Depkes RI; 3. Lain-lain
Ketua Rapat	:	Dr. Ribka Tjiptaning / Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris	:	Dra. Tri Udiartiningrum/ Kabagset. Komisi IX DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI, Gedung Nusantara I Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Anggota yang hadir	:	40 Anggota dari 50 Anggota Komisi IX DPR RI 5 orang Ijin, 1 orang sakit

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI beserta jajarannya dibuka pukul 10.40 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 99 ayat (1) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat didahului dengan Pengantar Ketua Komisi IX DPR RI dilanjutkan dengan paparan dari Menteri Kesehatan RI.

**KESIMPULAN**

Setelah mendengar usulan/tanggapan dari Anggota Komisi IX DPR RI dan jawaban Menteri Kesehatan RI, maka kesimpulan Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan RI yaitu :

1. Komisi IX DPR RI mendesak Departemen Kesehatan RI untuk menjadikan Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagai payung hukum dalam pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat bagi masyarakat miskin 2008. Untuk itu perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat miskin tahun 2008 melalui pembicaraan bersama antara Komisi IX DPR RI dengan Departemen Kesehatan RI.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Departemen Kesehatan RI untuk bertanggung jawab penuh dalam pencegahan penyakit menular dan gizi buruk dengan memberdayakan masyarakat serta melibatkan berbagai sektor lain termasuk pemerintah daerah.